

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan (MMP15302) berisi penjelasan mengenai perkembangan hukum laut, batas maritim, politik hukum perikanan, usaha kelautan dan perikanan, penegakan hukum di wilayah laut, dan penelitian ilmiah kelautan.

Setelah membaca materi modul ini, diharapkan Anda dapat memahami hukum internasional dan implementasi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemahaman Anda diharapkan mampu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Lebih khusus lagi, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang:

1. Sejarah konferensi Hukum Laut Internasional.
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut dan Perkembangannya di Sektor Perikanan.
3. Konsep negara kepulauan.
4. Perkembangan perundang-undangan kelautan Indonesia.
5. Rezim-rezim hukum laut dan aturan penarikan garis batas maritime.
6. Perkembangan peraturan perundang-undangan batas maritim Indonesia dan status perjanjian batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.
7. Penyelesaian sengketa batas maritim sesuai hukum laut internasional.
8. Teori perjanjian internasional dan ratifikasi hukum internasional.
9. Perkembangan hukum internasional dalam pengelolaan perikanan.
10. Organisasi pengelolaan perikanan yang berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia dan status hukum internasional bidang perikanan dan keanggotaan Indonesia dalam organisasi pengelolaan perikanan regional.
11. Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
12. Menjelaskan usaha di bidang perikanan.
13. Aturan kapal ikan dan alat penangkap ikan serta kepelabuhanan perikanan.
14. Peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai legitimasi kewenangan lembaga penegak hukum di wilayah laut.
15. Sistem peradilan perikanan di Indonesia.
16. Pelibatan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di wilayah laut.
17. Penyelesaian sengketa di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
18. Pencemaran laut.
19. Penelitian ilmiah kelautan sesuai hukum laut internasional.
20. Alih Teknologi Kelautan.
21. Aturan penelitian hukum sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia.

Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka materi dibagi menjadi 6 modul. Satu modul terdiri atas beberapa kegiatan belajar (KB). Sistematikanya secara lengkap adalah sebagai berikut.

Modul 1 : Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia

Kegiatan Belajar 1 : Sejarah Konferensi Hukum Laut Internasional

Kegiatan Belajar 2 : Konvensi PBB Tentang Hukum Laut dan Perkembangannya di Sektor Perikanan

Kegiatan Belajar 3 : Konsepsi Negara Kepulauan

Kegiatan Belajar 4 : Perkembangan Perundang-Undangan Kelautan Indonesia

Modul 2 : Batas Maritim

Kegiatan Belajar 1 : Rezim-Rezim Hukum Laut

Kegiatan Belajar 2 : Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Batas Maritim

Kegiatan Belajar 3 : Status Perjanjian Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga

Kegiatan Belajar 4 : Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Sesuai Hukum Laut Internasional

Modul 3 : Politik Hukum Perikanan

Kegiatan Belajar 1 : Teori Perjanjian Internasional dan Ratifikasi Hukum Internasional

Kegiatan Belajar 2 : Perkembangan Hukum Internasional dalam Pengelolaan Perikanan

Kegiatan Belajar 3 : Organisasi Pengelolaan Perikanan yang Berhadapan atau Berdampingan Dengan Indonesia

Kegiatan Belajar 4 : Status Hukum Internasional Bidang Perikanan dan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional

Modul 4 : Usaha Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Belajar 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Kegiatan Belajar 2 : Usaha di Bidang Perikanan

Kegiatan Belajar 3 : Aturan Kapal Ikan dan Penggunaan Alat Penangkap Ikan

Kegiatan Belajar 4 : Aturan Kepelabuhanan Perikanan Indonesia

Modul 5 : Penegakan Hukum di Wilayah Laut

Kegiatan Belajar 1 : Peraturan Perundang-Undangan Indonesia sebagai Legitimasi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Laut

Kegiatan Belajar 2 : Sistem Peradilan Perikanan di Indonesia

Kegiatan Belajar 3 : Aturan Pelibatan Masyarakat dalam Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Laut

Kegiatan Belajar 4 : Penyelesaian Sengketa di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Modul 6 : Penelitian Ilmiah dan Alih Teknologi Kelautan

Kegiatan Belajar 1 : Penceramahan Laut

Kegiatan Belajar 2 : Penelitian Ilmiah Kelautan Sesuai Hukum Laut Internasional

Kegiatan Belajar 3 : Aturan Alih Teknologi Kelautan Sesuai Hukum Laut Internasional

Kegiatan Belajar 4 : Aturan Penelitian Hukum Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Peta Kompetensi
Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan/MMPI5302/2 sks

